



Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	5
---	---	---	---

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

SUBBAGIAN HUMAS

Kompas	Media Ind	Tempo	Sindo
Indo Pos	Pos Kota	Warta Kota	

# Dinas Pertamanan Paling Rendah Serap Anggaran

JAKARTA (Pos Kota) - Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI menjadi salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki serapan anggaran rendah.

Hal itu terkait belum maksimalnya anggaran pembebasan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dari total anggaran pembebasan lahan sebesar Rp2,3 triliun yang dialokasikan dalam APBD 2015, baru sebesar Rp44 miliar atau 3,94 persen yang terserap.

Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI, Ratna Diah Kurniati mengungkapkan, belum terserapnya anggaran pembebasan lahan, karena pihaknya harus melakukannya sesuai dengan UU UU Nomor 2/

2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Salah satunya dengan menyertakan Surat Keputusan (SK) Penetapan Gubernur untuk pembebasan lahan.

Di tiap lokasi pembebasan lahan, lanjut dia, harus ada SK Penetapan Gubernur. Yakni sesuai aturan Badan Pertanahan Nasional (BPN). "Pak Gubernur sudah mengeluarkan SK Penetapan Gubernur untuk pembebasan lahan di 38 lokasi," ujar Ratna, Senin (7/9).

Adapun proses pembebasan lahan dari Dinas Pertamanan dan Pemakaman kemudian ke Dinas Penataan Kota terus ke gubernurI untuk penerbitan SK Penetapan Gubernur.

"Selanjutnya ke BPN. Kami juga harus bikin SKT (surat keterangan tanah) ke BPN dan kami minta uangnya ke BP-KAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) untuk proses pembayaran," kata Ratna. (guruh/st)